

Receive : 24 October 2025
Revised : 17 November 2025
Accepted : 22 November 2025

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.109
Vol. 7 No. 2, December 2025, Hlm. 132-149



Implementasi Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu

***Ade Putra Ode Amane¹, Filo Leonardo Tinggogoy²**

Email : putrohade@gmail.com*

¹Universitas Muhammadiyah Luwuk

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu dalam pembinaan administrasi pelaporan keuangan desa di Desa Todoli Kecamatan Lede, serta peran sekretaris desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 45 kepala keluarga dari populasi 1500 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator administrasi pemerintahan desa. Data dianalisa menggunakan teknik persentase dan skala likert untuk mengukur setiap indikatornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan pegawai inspektorat berjalan dengan baik, terlihat dari perencanaan, pengarahan, pengawasan, hingga evaluasi yang dilakukan dalam pelaporan keuangan desa. Sekretaris desa juga memiliki peran strategis dalam menjaga tertib administrasi. Diharapkan melalui peningkatan pembinaan dan kompetensi aparatur desa dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa, Kinerja Inspektorat, Pelaporan Keuangan Desa.

LATAR BELAKANG

Desa dapat dikatakan sebagai hakikat keberadaan Negara Republik Indonesia dikarenakan desa yang telah lama hadir di nusantara ini sebelumnya Negara Republik Indonesia berdiri. Para Founding Fathers mendirikan Negara Republik Indonesia tidak serta-merta menurunkan dari suatu ide yang vakum, melainkan mendirikan sebuah negara yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah lama di Indonesia. Desa dicirikan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup di suatu wilayah di mana mereka mampu mengatur dirinya sendiri berdasarkan adat-istiadatnya. Mengakarnya adat-istiadat ke dalam ruh masyarakat menyebabkan desa mampu menjadi suatu entitas yang bertahan hidup sekian lama. Hal ini dikarenakan desa merupakan entitas yang sudah mempunyai pemerintah yang mapan dalam mengatur dirinya sendiri.

Pemerintah Desa tersusun atas kumpulan-kumpulan jabatan, yang didalamnya terdapat Perangkat Desa. Perangkat Desa yang dimaksud dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (Kades). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun (Kadus) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur sebuah organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa merupakan bentuk nyata implementasi dari pemerintah pusat dalam rangka penguatan kewenangan pemerintah desa secara konsekuen dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa ini adalah merupakan komitmen pemerintah untuk mempertegas posisi desa dan secara konsisten harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kemajuan Desa tercermin dari kemampuan Sekretaris desa sebagai pengelola administrasi desa maupun pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin

sekretariat desa. Keberadaan sekretaris desa mempunyai peran penting untuk membantu dan menata administrasi desa.

Pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di desa. Disamping itu pemerintahan desa dan kelurahan merupakan salah satu aspek yang dianggap penting dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja aparatur pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan di desa. Hal ini karena penertiban administrasi di desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan desa beserta aspek-aspek tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan kepadanya. Peningkatan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat berperan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang di bebankan kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi sebagai komponen penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa. Untuk dapat memberikan hasil yang optimal di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa maka diperlukan adanya kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan aparat pelaksana itu

sendiri maupun dari segi ketersediaan fasilitas pendukung, termasuk kondisi pekerjaan yang dilaksanakan sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu saja terdapat kegiatan administrasi. Administrasi dalam arti luas merupakan proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, mengetik, dan lain-lain atau dapat dikatakan kegiatan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Administrasi yang dilaksanakan di desa disebut administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan arti sempit dari pengertian administrasi. Ruang lingkup administrasi pemerintahan desa terdiri atas lima administrasi, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Pelaksanaan Administrasi pemerintahan desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana

administrasi berpengaruh terhadap kelancaran jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai pelaksana perlu menjalankan tertib administrasi. Nurcholis (2011:135) menyatakan bahwa :

“Pemerintahan Desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.” Pencatatan data dan informasi di Desa Tamangede terdapat dua cara, yaitu dicatat secara manual dan input pada sistem informasi. Pencatatan secara manual dilakukan dengan mengisi pada buku register desa yang terdiri dari buku administrasi umum, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan, dan buku administrasi penduduk. Sedangkan sistem informasi yang digunakan adalah SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yaitu untuk pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi penduduk. Mengingat pentingnya kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan tersebut di lapangan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 1500 Kepala Keluarga di Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu dan sampel penelitian ini yaitu sebanyak 45 responden kepala keluarga. Terdapat 2 teknik sampling yaitu : nonprobability sampling dan probability sampling dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan cara meyeleksi secara acak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik Analisa data yang bersifat kualitatif yaitu dengan mengadakan pengolahan dan penganalisaan data yang terkumpul dan kemudian dianalisa dengan penjelasan secara sistematis. Agar lebih efisien, relevan dan akurat maka Analisa data ini didasarkan pada jenis dan sumber data yang di kumpul untuk data hasil kuisisioner dilakukan olahan hasil dalam bentuk tabulasi untuk mendapatkan gambaran Kesimpulan.

Dalam memudahkan penarikan kesimpulan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

f = Frekuensi Data

N = Jumlah Sampel yang diolah

Dan apabila data diinterpretasikan dalam bentuk presentase maka klasifikasi jawaban responden adalah sebagai berikut :

Tabel.1
presentase jawaban Responden

No	Interval	Kategori
1	1% - 20%	Sangat tidak baik
2	21% -40%	Kurang baik
3	41% -60%	Baik
4	61% -80%	Cukup baik
5	81% - 100%	Sangat Baik

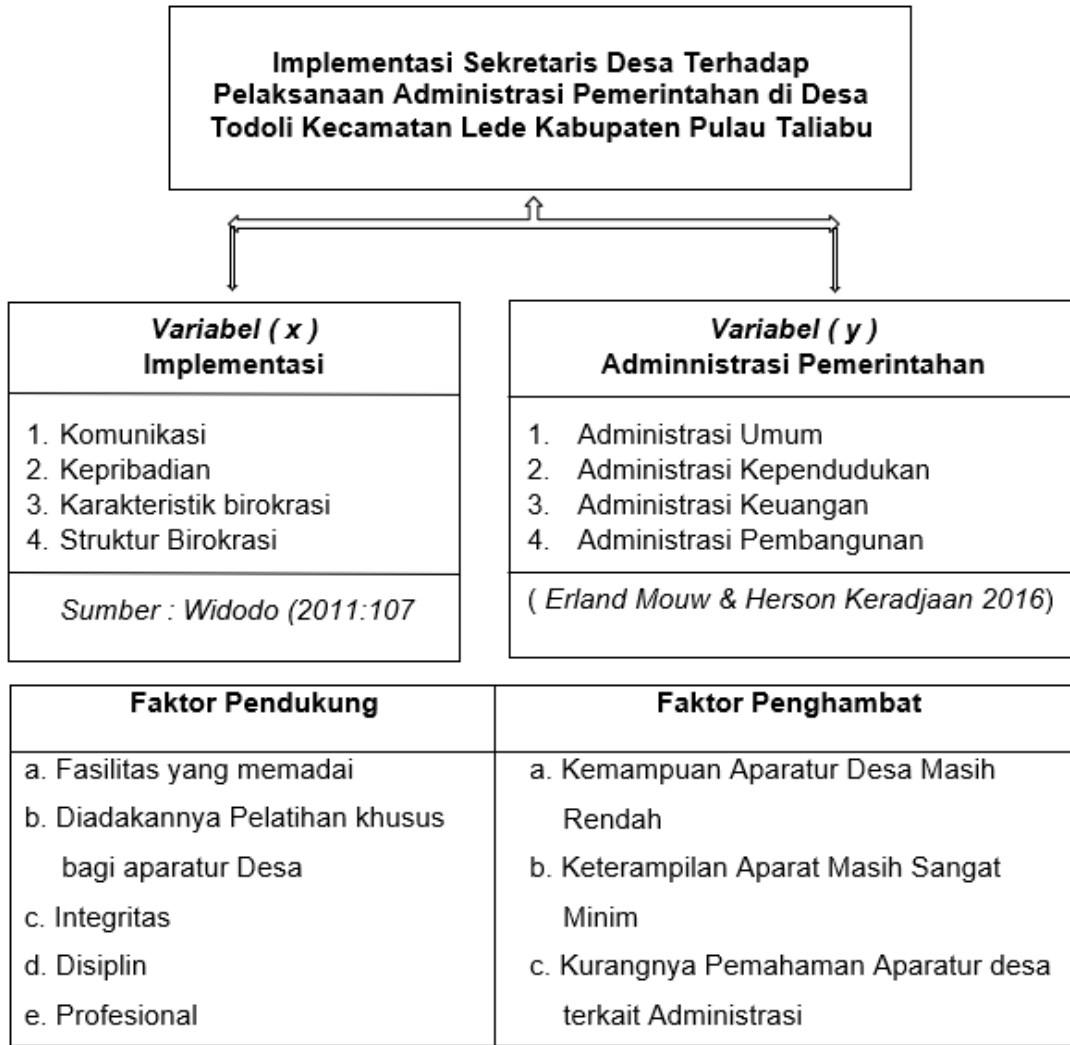
Dalam penelitian ini proses untuk mengklasifikasi data yang telah terkumpul secara rinci, sistematis, menggunakan Teknik presentase yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur setiap indicator adalah dengan menggunakan skala likert, dengan memberikan skor pada setiap kategori sebagaimana yang dikemukakan oleh sugiyono (2006)

Untuk Analisa data maka peneliti memberi Bobot pada masing- masing - masing jawaban sebagai berikut :

1. Jawaban a nilai bobotnya 5 adalah sangat Baik
2. Jawaban b nilai Bobotnya 4 adalah Cukup Baik
3. Jawaban c nilai Bobotnya 3 adalah Baik
4. Jawaban d nilai Bobotnya 2 adalah Kurang Baik
5. Jawaban e nilai Bobotnya 1 adalah Sangat tidak Baik

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variable yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2018:63) variable penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang diteliti harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

Gambar 1
 Bagan Kerangka Pemikiran



Implementasi dari tugas dan kualitas kerja sekretaris desa merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu birokrasi pemerintahan desa. Kinerja pemerintahan desa harus bersinergi dengan aparatur desa agar mampu menyelesaikan tugas dan fungsi dengan baik. Artinya dalam upaya mewujudkan

kualitas kerja aparatur kepada masyarakat terletak pada aparatur pemerintah itu sendiri. Karena sebagai unsur pelaksanaan dalam pembangunan kerja aparatur kerja pemerintahan desa harus menyadari bahwa tugas-tugas mereka berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sehingga kemampuan dan keterampilan mereka

Receive : 24 October 2025
Revised : 17 November 2025
Accepted : 22 November 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.109

di dalam melakukan kerja aparatur kepada masyarakat di tuntut secara maksimal.¹ implementasi merupakan suatu kegiatan yang diencanakan serta dilaksanakan dengan baik guna mencapai tujuan kegiatan dengan implementasi yang serius maka akan menjadi sarana atau media untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang sudah ditetapkan. Dalam tata pemerintahan desa, Sekretaris Desa merupakan salah satu perangkat desa yang mempunyai kedudukan untuk memimpin sekretariat desa dan menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007. Pada pasal (1) ayat (6) yang tertulis bahwa tugas Sekretaris Desa adalah membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.² Sesungguhnya proses pencatatan data dan informasi tidak terlalu rumit untuk dilakukan, asal semua perangkat desa, mulai dari tingkat Dusun sampai Sekretaris Desa, memiliki komitmen dan tekun di dalam melakukan pengisian. Setiap desa harus memiliki buku register

desa, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa, yang pada tahun 2016 sudah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa³ Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2

PEMBAHASAN

1. Temuan Penelitian

1.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden penelitian merupakan profil pada objek penelitian yang dapat memberikan penafsiran terhadap objek penelitian yaitu sejauh mana kinerja sekretaris desa dalam memberikan pembinaan administrasi laporan keuangan desa terhadap kecamatan dan kabupaten pulau taliabu.

¹ Penyelenggaraan and Naranjo, "Implementasi Fungsi Sekeretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." 2014

² Mussie Ghebrebrhan Zerizghy et al., "Peran Sekertaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Kanonag Kab, Minahasa,"

American Journal of Research Communication 5, no. August (2009): 12–42,

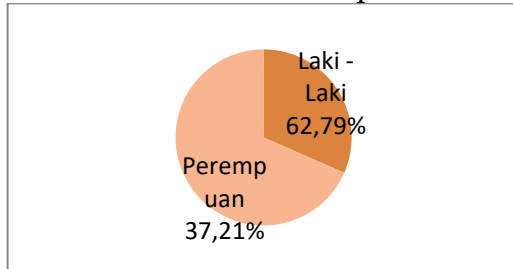
³ *Ibid.*

Dari data karakteristik 43 responden dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan:

1) Jenis Kelamin.

Faktor jenis kelamin dari responden adalah salah satu data yang menentukan dalam melihat objektifitas dari suatu penelitian. Untuk lebih itu jelasnya dapat dilihat pada Gambar Berikut :

Gambar. 2
Jenis kelamin dari responden



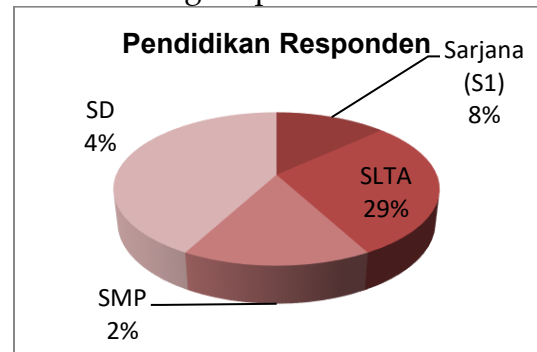
Dari data pengolahan data primer di atas jelas bahwa dalam penelitian, kinerja sekretaris desa dalam memberikan pembinaan administrasi laporan keuangan desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu. yang mendominasi adalah jenis kelamin Laki-laki dengan persentase mencapai 62,79%.

2) Tingkat Pendidikan responden.

Penulis juga melihat karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan, karena didasari bahwa dalam waktu penelitian salah satu indikator keberhasilan penelitian antara lain dapat dilihat

dari bagaimana pengetahuan responden berdasarkan dari tingkat Pendidikan yang dimiliki. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 3
Distribusi responden berdasarkan Tingkat pendidikan



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden sangat beragam, namun bukan menjadi suatu indikator penentu karena selain tingkat pendidikan, peneliti juga memperhatikan tingkat pengalaman dalam bekerja sama sehingga nantinya data yang diperoleh relevan dan dapat dipertanggung jawabkan

1.2. Hasil Kuesioner Penelitian

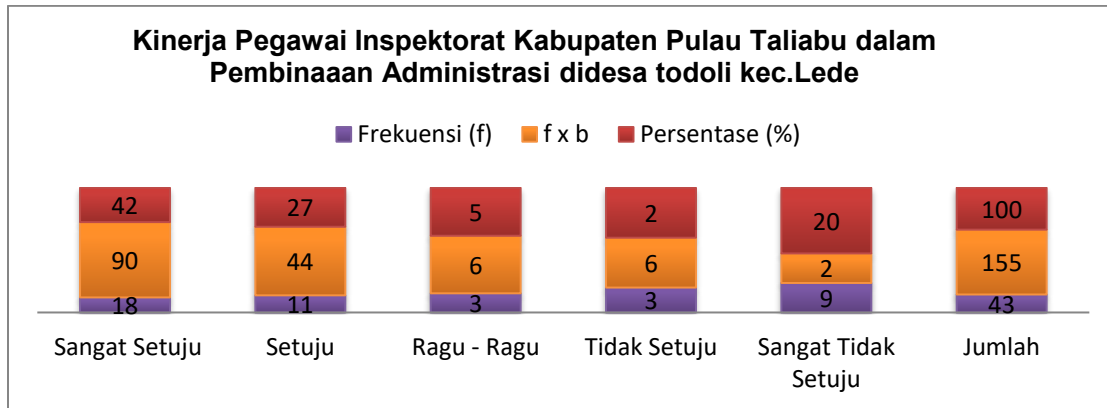
Hasil penelitian kuisisioner ini merupakan hasil tanggapan responden yang di nilai berdasarkan pernyataan yang disusun berdasarkan judul penelitian. Dalam penelitian tentang kinerja pegawai inspektorat kabupaten

pulau taliabu dalam pembinaan adminitrasi di kantor desa todoli dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan terhadap pegawai desa todoli terkait pelaporan keuangan di desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu. Terdapat dua variable yang kemudian akan penulis jabarkan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode

kuisisioner dan hasil dan jawaban tersebut penulis jabarkan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami.

Variabel (X) kinerja pegawai inspektorat kabupaten pulau taliabu dalam pembinaan adminitrasi di kantor desa todoli dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan terhadap pegawai desa todoli.

Tabel. 2
 Adanya perencanaan program yang dibuat oleh pegawai inspektorat dalam memberikaan pembinaan administraasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa

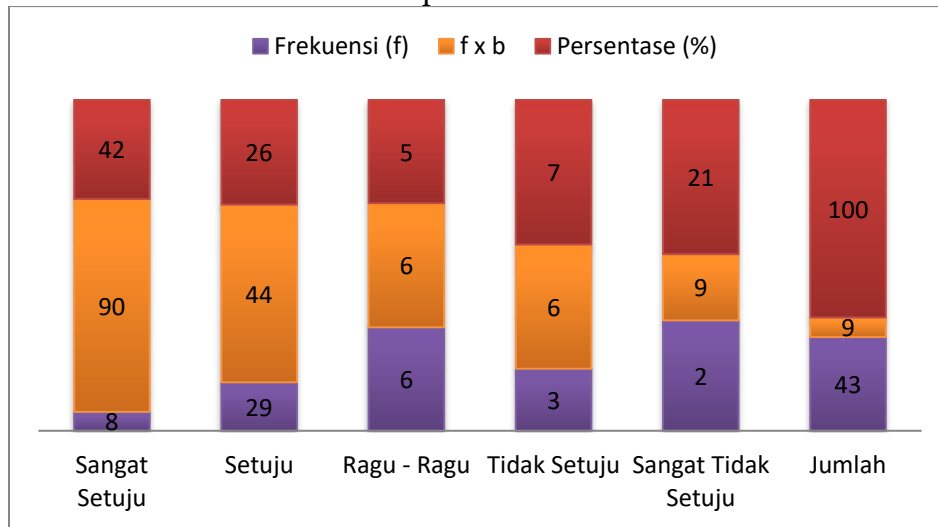


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 18 orang (35%), yang menjawab setuju sejumlah 11 orang (25, 58%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 2 orang (4,65%), yang menjawab tidak setuju 0 orang(6,98%), dan menjawab sangat tidak setuju sejumlah 0 orang (20,93%). Jika dilihat dari jawaban responden yang ada, ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukan bahwa ad penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah

pemerintah desa todoli kecamatan lede
 kabupaten pulau taliabu

Tabel 3
 Adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inspektorat dalam
 memberikan pembinaan administrasi

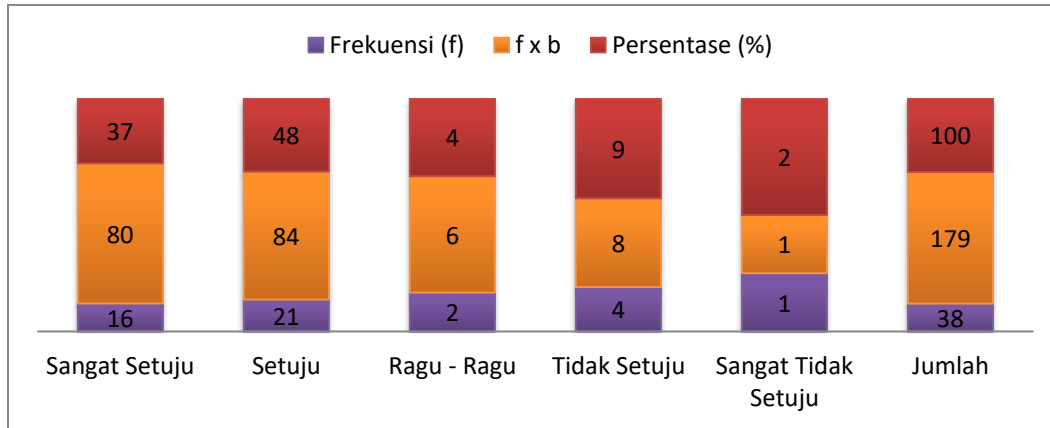


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 8 orang (18,60%), yang menjawab setuju sejumlah 12 orang (27,91%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 5 orang (11,63%), yang menjawab tidak setuju 3 orang(6,98%), dan menjawab tidak setuju sejumlah 15 orang (34,88%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adnyah penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 4

Adanya pengarahan dari pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keungan desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu

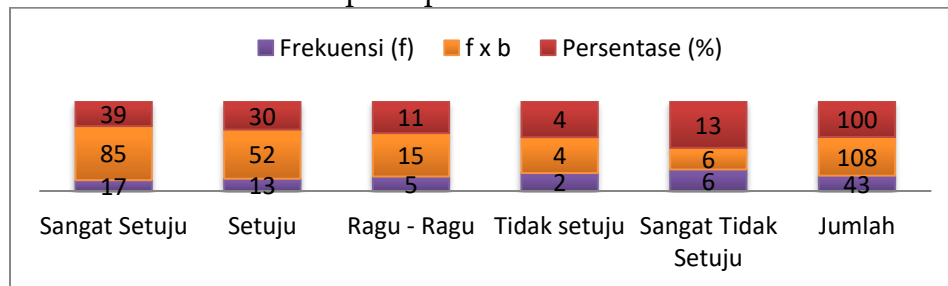


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 16 orang (37,21%), yang menjawab setuju sejumlah 21 orang (48,84%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 2 orang (4,65%), yang menjawab tidak setuju 4 orang(9,30%), dan menjawab setuju sejumlah 1 orang (2,32%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepada pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 5

Adanya pengarahan dari pegawai inspektorat dalam penggunaan keuangan desa kepada pemerintah desa

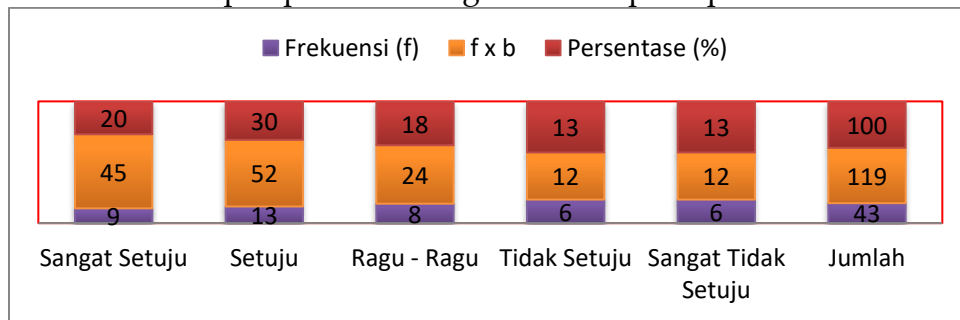


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 17 orang (39,53%), yang menjawab setuju sejumlah 13 orang (30,23%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 5 orang (11,63%), yang menjawab tidak setuju 2 orang(4,65%) dan menjawab setuju sejumlah 6 orang (3,95%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 6

Adanya proses pengembalian dari pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan administrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa

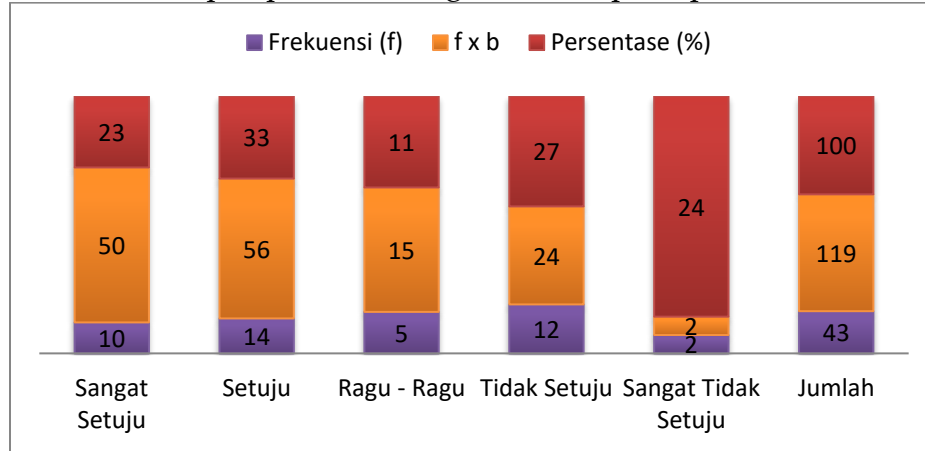


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 9 orang (20,93%), yang menjawab setuju sejumlah 13 orang (30,23%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 8 orang (18,60%), yang menjawab tidak setuju 6 orang(13,95%) dan menjawab setuju sejumlah 7 orang (16,28%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 7

Adanya bimbingan dari pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan administrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa

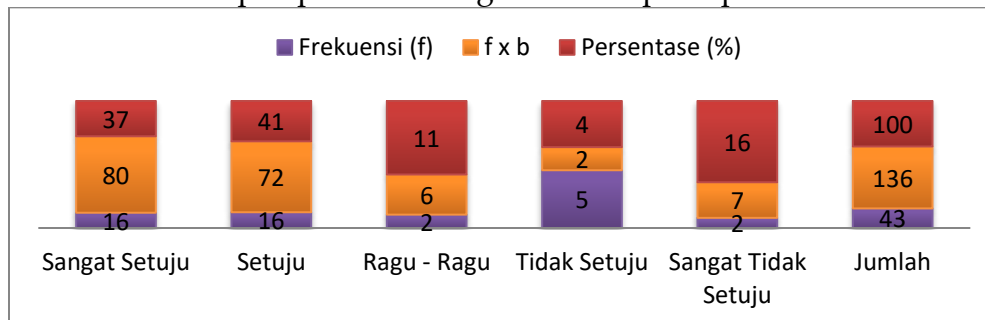


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 10 orang (23,25%), yang menjawab setuju sejumlah 14 orang (32,65%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 5 orang (11,63%), yang menjawab tidak setuju 12 orang(27,91%) dan menjawab setuju sejumlah 2 orang (4,65%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 8

Adanya koreksian dari pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan administrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa

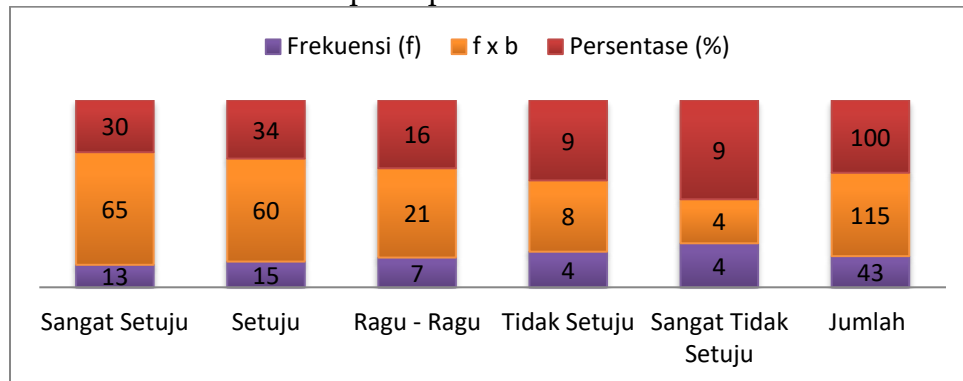


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 16 orang (37,21%), yang menjawab setuju sejumlah 18 orang (41,86%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 2 orang (4,65%), yang menjawab tidak setuju 5 orang(11,63%) dan menjawab setuju sejumlah 2 orang (4,65%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adnyah penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 9

Adanya evaluasi dari pegawai inspektorat terhadap penggunaan keuangan desa kepada pemerintah desa.

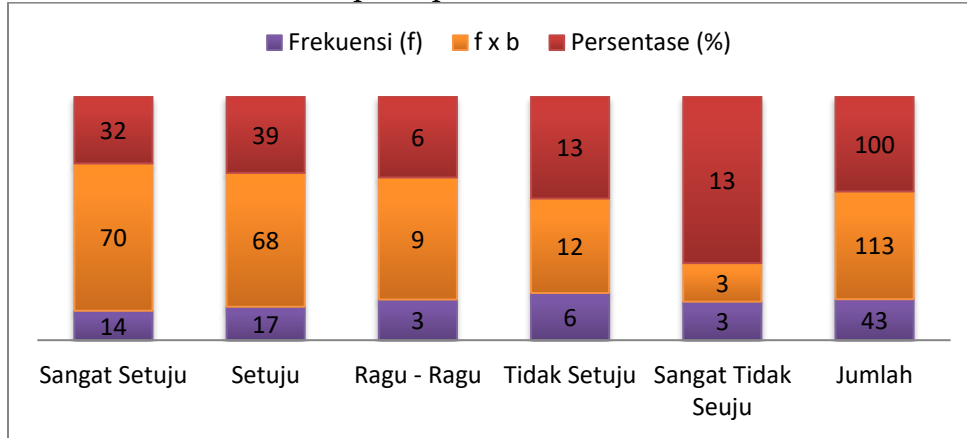


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 13 orang (30,23%), yang menjawab setuju sejumlah 15 orang (43,88%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 7 orang (16,28%), yang menjawab tidak setuju 4 orang(9,30%) dan menjawab setuju sejumlah 4 orang (9,30%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adnyah penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 10

Adanya pengawasan dari pegawai inspektorat terhadap penggunaan keuangan desa kepada pemerintah desa

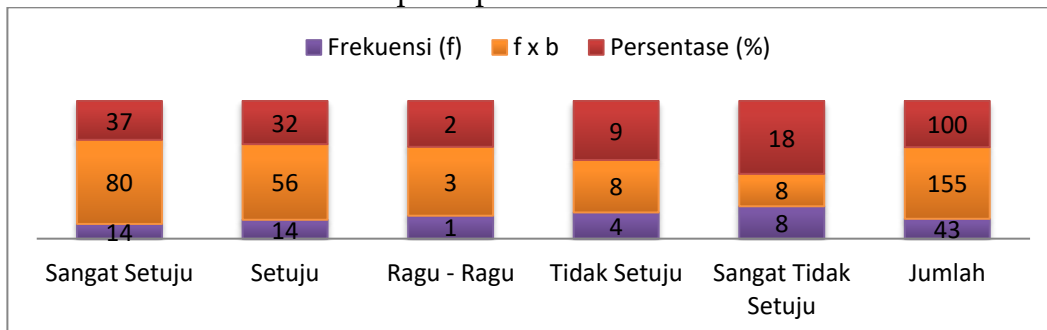


Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inspektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan administrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 14 orang (32,56%), yang menjawab setuju sejumlah 17 orang (39,53%), yang

menjawab ragu-ragu sejumlah 3 orang (6,98%), yang menjawab tidak setuju 6 orang (13,95%) dan menjawab setuju sejumlah 3 orang (6,96%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan admitrasih pelaporan keuangan di desa kepadah pemerintah desa todoli .kecamatan lede kabupaten pulau taliabu.

Tabel 11

Adanya masukan tertulis dari pegawai inspektorat terhadap penggunaan keuangan desa kepada pemerintah desa.



Dari 43 responden yang jadi sampel dalam penelitian ini yang memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa adanya penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inpektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli sejumlah 16 orang (37,21%), yang menjawab setuju sejumlah 14 orang (32,56%), yang menjawab ragu-ragu sejumlah 1 orang (2,33%), yang menjawab tidak setuju 4 orang (9,30%) dan menjawab setuju

sejumlah 8 orang (18,60%). Jika dilihat dari hasil diatas menunjukan bahwa adanya masukan tertulis dari pegawai inpektorat terhadap penggunaan keuangan desa kepada pemerintah mengetahui secara langsung akumulasi tanggapan responden desa. Untuk tenaga kerja pegawai inpektorat dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan di desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu dapat kita lihat hasil rekapitulasi tanggapan responden pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Rekapitulasi Tabel Tangapan Responden.

No Tabel	Persentase (%)	Kategori
3	72,09	Baik
4	57,67	Kurang Baik
5	83,25	Sangat Baik
6	75,35	Baik
7	65,12	Baik
8	68,37	Baik
9	79,10	Baik
10	37,49	Baik
11	75,35	Baik
12	72,09	Baik
Jumlah	721,88	
Rata-Rata	$721,88:12= 70,16$	Baik

2. Implementasi Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintah desa todoli yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerja sama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Pengelolaan keuangan daerah baik di kota maupun kabupaten yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman system akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki kurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik dengan tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan public.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDdes, peraturan desa, pelaporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada bupati/walikota dan masyarakat. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagai mana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Inspektorat daerah kabupaten pulau taliabu adalah merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh pemerintah desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa

Berdasarkan hasil penelitian kami di desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu tentang kinerja pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan administrasi pelaporan keuangan di desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu dapat

Receive : 24 October 2025
Revised : 17 November 2025
Accepted : 22 November 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.109

dikatakan baik hal ini dapat dilihat sesungguhnya adanya perencanaan program yang dibuat oleh pegawai inspektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberiakan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepada pemerintah desa todoli, adanyah penyusunan program yang dibuat oleh pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepдах pemerintah desa todoli adanyah pengarah dari pegawai inspektorat kabupten pulau taliabu dalam penggunaan keuangan desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede, adanya proses pengendalian dari pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan desa kepadah pemerintah desa sertah adanya bimbingan dari pegawai inspektorat kabupaten pulau taliabu dalam memberikan pembinaan adminitrasi plaporan keuangan desa kepadah pemerintah desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian secara umum menunjukan bahwa Kinerja pegawai inspektorat dalam memberikan pembinaan adminitrasi pelaporan keuangan di desa todoli kecamatan lede kabupaten pulau taliabu menunjukan baik dengan rata-rata tanggapan responden sebesar 70,16%.

DAFTAR PUSTAKA

- Erland Mouw & Herson Keradjaan (2016). "Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Buku Administrasi Desa." Jurnal UNIERA 5(2), 19–26.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang. Bayu Media